

PERSEPSI MANAJEMEN BUMD TERHADAP PRAKTIK PENGAWASAN OLEH DEWAN PENGAWAS ATAU KOMISARIS BUMD

Fenty Fajarwati¹, Muhamad Shodiqun²

¹Magister Akuntansi, Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia

²Magister Akuntansi, Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia

Penulis korespondensi: fenty.fajarwati@widyatama.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi manajemen terhadap praktik pengawasan oleh dewan pengawas atau komisaris BUMD Kabupaten Garut. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai level menengah dari BUMD Kabupaten Garut dan sampel yang digunakan sebanyak 40 orang. Metode penelitian ini dapat dikategorikan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi manajemen berpengaruh terhadap praktik pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris BUMD Kabupaten Garut.

KATA KUNCI

Persepsi Manajemen
Praktik Pengawasan
BUMD

PENDAHULUAN

Sebagai perintis di industri yang belum pernah dimasuki oleh perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Desa (BUMD) memainkan peranan yang signifikan dalam mendorong pembangunan di suatu daerah. Selain itu, BUMD berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan pasar, mendorong pertumbuhan usaha kecil maupun menengah, dan mengimplementasikan layanan publik. Beberapa BUMD juga bisa menjadi sumber pemasukan bagi daerah melalui pajak, dividen, atau privatisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005 dijelaskan bahwa Privatisasi adalah penjualan saham dalam bisnis lokal dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan, memberi manfaat bagi masyarakat dan daerah secara lebih luas, dan memungkinkan masyarakat umum untuk membeli lebih banyak pilihan saham.

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) memegang peran penting dalam mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan BUMD dalam mencapai tujuannya yaitu dalam melaksanakan tugas pengawasan tidak terlepas dari peran efektif Dewan Pengawas atau Komisaris. Pengawasan yang baik akan memastikan BUMD dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan, serta selaras dengan tujuan pendiriannya. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persepsi manajemen terhadap praktik pengawasan. Faktor pertama, komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara manajemen BUMD dan Dewan Pengawas/Komisaris. Komunikasi yang terbuka dan konstruktif menjadi kunci terpenting dalam menumbuhkan rasa saling percaya serta

memperjelas pemahaman yang sama tentang tujuan dan peran masing-masing. Kedua, kejelasan ruang lingkup dan metode pengawasan. Dewan Pengawas/Komisaris perlu menetapkan ruang lingkup pengawasan yang jelas dan terukur, serta menggunakan metode pengawasan yang efektif dan efisien, kompetensi dan profesionalisme. Kompetensi dan profesionalisme Dewan Pengawas/Komisaris dalam bidang bisnis dan tata kelola perusahaan akan memengaruhi kredibilitas mereka dalam melaksanakan tugas pengawasan, dukungan dan intervensi dari pihak eksternal. Dukungan dan intervensi dari pihak eksternal, seperti pemerintah daerah dan DPRD, perlu dilakukan secara proporsional dan tidak mengganggu independensi Dewan Pengawas/Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Kabupaten Garut memiliki BUMD yang bergerak di beberapa sektor ekonomi seperti transportasi, energi, dan layanan publik. BUMD memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Garut. Dewan Pengawas atau Komisaris memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan kinerja manajemen BUMD. Pengawasan ini meliputi perspektif *financial* perusahaan, kegiatan operasional perusahaan serta kepatuhan BUMD terhadap peraturan yang berlaku. Persepsi manajemen terhadap praktik pengawasan menjadi krusial untuk menentukan efektivitas pengawasan itu sendiri. Persepsi yang baik dapat memperkuat kerjasama antara manajemen dan pengawas, serta mendukung pencapaian tujuan strategis BUMD. Implementasi pengawasan yang efektif tidak selalu berjalan mulus. Tantangan dapat muncul dari berbagai faktor seperti perbedaan visi, prioritas, atau pemahaman terkait peran dan fungsi masing-masing pihak dalam struktur pengawasan BUMD. Evaluasi terhadap persepsi manajemen terhadap pengawasan Dewan Pengawas atau Komisaris juga penting untuk memastikan keberlanjutan kinerja di masa depan. Persepsi yang positif dapat meningkatkan motivasi dan komitmen manajemen dalam mematuhi standar pengawasan yang lebih ketat.

Latar belakang penelitian ini berfokus pada persepsi di kalangan staf dan manajemen BUMD. Dalam konteks ini, penelitian akan menggali lebih dalam mengenai persepsi ini, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasarinya, dan mengevaluasi sejauh mana peran dewan pengawas atau komisaris benar-benar memberikan kontribusi positif atau justru memerlukan peningkatan dalam implementasinya. Serta, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih terkait dinamika internal BUMD dan relevansi peran pengawasan korporat dalam konteks spesifik ini.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Agency Theory

Agency Theory adalah suatu teori yang dapat menggambarkan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. *Principal* adalah pihak yang menyerahkan wewenang kepada *agent* untuk melaksanakan seluruh aktivitas pengambilan keputusan (Jansen dan Mecking, 1976). Perusahaan seringkali dianggap sekumpulan kontrak kerjasama antara manajer dengan pemegang saham. Pemilik perusahaan menyerahkan tanggungjawab perusahaan kepada manajer. Hal ini bisa terjadi karena manajer merupakan pihak yang dapat menyediakan laporan keuangan dan otorisasi untuk operasi perusahaan. Manajer juga dapat mengungkapkan informasi keuangan yang akan memaksimalkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham. Konflik antara hubungan manajer dengan pemegang saham dapat disebut juga masalah keagenan. Cara untuk mengurangi konflik tersebut dibutuhkan mekanisme pengawasan. Mekanisme ini dapat menyelaraskan kepentingan-kepentingan kedua pihak dan dapat menurunkan *agency cost*.

Dari penjelasan diatas, teori ini mengasumsikan bahwa setiap orang hanya memerdulikan kepentingan sendiri sehingga menyebabkan timbulkan konflik diantara kedua pihak. Dimana, *agent* seringkali menyimpan berbagai macam informasi di bandingkan *principal* sehingga menyebabkan adanya

ketidakseimbangan informasi. *Agent* kemungkinan dapat memanipulasi laba dalam kondisi asimetri ini yang mempengaruhi nilai akuntansi yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Tindakan *agent* yang melakukan pelaporan laba secara oportunistik untuk kepentingan pribadi dapat menyebabkan menurunnya kualitas laba. Menurunkan kualitas laba dapat mempengaruhi pembuatan keputusan yang dilakukan investor dan kreditor. *Agency theory* ini menggambarkan hubungan pemilik perusahaan sebagai pihak *principal* dan manajer sebagai pihak *agent* dalam perusahaan. Fokus utamanya adalah mengatasi konflik kepentingan antara kedua pihak ini melalui mekanisme pengawasan seperti dewan pengawas atau komisaris.

Badan Usaha Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1962, perusahaan daerah merupakan suatu badan usaha legal yang dibuat sesuai dengan peraturan daerah. Penerapan peraturan ini memberi mereka kedudukan tertentu. Badan Usaha Milik Daerah adalah perusahaan yang dikelola disuatu daerah yang bertujuan memaksimalkan pendapatan daerah untuk pembangunan, pertumbuhan sekaligus menggali potensi daerah. Selain itu, perusahaan daerah merupakan suatu organisasi yang menyediakan pelayanan jasa, memberikan pemanfaatan secara umum kepada masyarakat serta untuk memupuk pendapatan daerah. Perusahaan daerah beroperasi pada bidang kegiatan rumah tangga yang diatur berdasarkan kebijakan dan peraturan yang diterapkan di daerah tersebut. BUMD dapat dimiliki oleh pemerintah daerah dengan ketentuan bahwa pembentukan, penggabungan, pengalihan hak milik, dan/atau pembubaran BUMD harus yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 32 Pasal 177 mengenai pemerintahan daerah. Pemisahan kekayaan daerah baik seluruh ataupun sebagian merupakan modal perusahaan daerah. Modal perusahaan daerah yang seluruh kekayaannya dipisahkan, modal tersebut berupa bagian dari saham. Sedangkan modal perusahaan daerah yang sebagian kekayaannya dipisahkan, modal ini bagian dari saham. Saham prioritas perusahaan daerah hanya bisa dimiliki pihak daerah. Sedangkan saham biasa bisa dimiliki oleh beberapa pihak seperti pihak daerah, masyarakat Indonesia maupun badan hukum yang anggotanya harus masyarakat Indonesia dan dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia. Besar nilai nominal saham prioritas maupun saham biasa dapat ditentukan dalam peraturan pendirian perusahaan daerah. Dari pembahasan diatas, maka buatlah suatu hipotesis penelitian, yaitu sebagai berikut:

H: PERSEPSI MANAJEMEN BERPENGARUH TERHADAP PRAKTIK PENGAWASAN YANG DILAKUKAN DEWAN PENGAWAS ATAU KOMISARIS BUMD KABUPATEN GARUT

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2019:126), populasi merupakan objek atau subjek dalam kawasan generalisasi yang memiliki karakteristik maupun kuantitas yang dipilih peneliti agar dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Pada penelitian ini populasi merupakan manajemen BUMD Kabupaten Garut pada tingkat atas, menengah dan operasional sebanyak 104 orang. Menurut Sugiyono (2019:127), sampel adalah bagian kecil dari suatu populasi yang diteliti. Tahapan pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability* dengan teknik *convenience sampling* sebanyak 40 orang. Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan dua jenis data dalam memecahkan masalah, yaitu data perusahaan dan penyebaran kuesioner kepada responden dengan *google form*.

Structural Equation Modeling (SEM) adalah metode menganalisis suatu data untuk menjelaskan secara lengkap hubungan variabel satu dengan variabel yang lain. SEM juga biasanya digunakan untuk

menganalisis dan mendukung sebuah model bukan merancang suatu teori saja. Maka dari itu, prasyarat terpenting dalam menggunakan SEM adalah menyusun model hipotesis berdasarkan penalaran teoritis berupa model structural dan model pengukuran yang berbentuk diagram jalur. SEM merupakan kumpulan metode statistik yang memungkinkan pengujian simultan dari banyak hubungan. Menurut Sudaryono (2017), terdapat dua hal yang melandasi penggunaan SEM. Pertama, SEM memiliki kemampuan dalam mengevaluasi hubungan kedua variabel. Pembentukan hubungan ini didasarkan pada model struktural (hubungan antara konstruk *dependent* dan *independent*). Kedua, SEM memiliki kemampuan untuk mengkarakterisasi bentuk interaksi antara konstruk laten (*unobserved*) dengan variabel manifes (*manifest variable* atau variabel indikator).

Pada metode SEM yang berbasis variasi dapat disebut dengan *Partial Least Square* (PLS). PLS ini biasa digunakan untuk pengujian model pengukuran maupun pengujian model structural. Model pengukuran biasanya digunakan untuk uji validitas dan uji reabilitas, sedangkan model structural biasanya digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis menggunakan model prediksi). Ghazali & Latan (2020), memaparkan bahwa PLS adalah metode analisis yang bersifat *soft modeling* karena metode ini, mengasumsikan hasil data tidak harus pada skala tertentu (dapat kurang dari 100 sampel). Menurut Abdillah & Jogiyanto (2019), PLS adalah teknik statistik *multivariate* yang membandingkan banyak variabel dependen berganda dengan variabel independen berganda. Tujuan PLS yaitu menemukan hubungan linier prediktif optimal dan terbaik dalam data. Serta untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel laten dan menjelaskan hubungan teoritis diantara dua variabel tersebut. Model teoritis yang dibangun, dapat digambarkan dengan path diagram, sehingga lebih mudah untuk memahami bagaimana variabel-variabel yang perlu diuji berhubungan satu sama lain. Pada diagram tersebut, hubungan antara konstruk digambarkan sebagai anak panah untuk menunjukkan hubungan langsung antar satu konstruk dengan yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada persepsi di kalangan staf dan manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menganggap bahwa Dewan Pengawas Atau Komisaris hanya merupakan formalitas belaka dan perannya tidak menambah secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Pandangan ini mencerminkan skeptisisme terhadap peran dan kontribusi yang sebenarnya dari dewan pengawas atau komisaris dalam pengelolaan perusahaan. Secara khusus, pandangan ini juga mencakup keyakinan bahwa keberadaan dewan pengawas atau komisaris tidak sepenuhnya mewakili kepentingan pemerintah, yang mungkin dianggap penting dalam konteks BUMD sebagai entitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Selain itu, struktur dan jumlah anggota Dewan Pengawas/Komisaris sering kali diatur berdasarkan jumlah direksi yang ada, anggotanya berasal dari unsur pemerintahan dan independen yang memiliki kecakapan di bidang keuangan. Namun demikian, muncul permasalahan terkait dengan efektivitas dewan pengawas atau komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan saran strategis kepada direksi. Terkadang, dewan pengawas atau komisaris dianggap beroperasi tidak optimal atau tidak sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, yang mungkin berpotensi mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan perusahaan.

Penelitian memiliki tujuan untuk membuktikan bahwa persepsi manajemen dapat berpengaruh terhadap praktik pengawasan yang dilakukan dewan pengawas atau komisaris. Dengan kata lain jika persepsi ini memberikan peningkatan terhadap praktik pengawasan maka peran dan tanggungjawab dewan pengawas/komisaris dapat dikatakan beroperasi secara optimal dan sesuai dengan yang seharusnya. Berikut tabel-tabel yang dapat mendukung pernyataan tersebut.

Tabel 1. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Laki - Laki	24	60.00
Perempuan	16	40.00
Total	40	100

Sumber: Data responden diolah, 2024

Berdasarkan tabel 1, dapat disimpulkan bahwa jumlah responden pada penelitian ini mayoritas laki – laki dengan persentase 60% sedangkan perempuan 40%.

Tabel 2. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
≤ 50 tahun	37	92.50
> 50 tahun	3	7.50
Total	40	100

Sumber: Data responden diolah, 2024

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat disimpulkan bahwa responden pada penelitian ini mayoritas dengan range usia dibawah 50 tahun dengan persentase 92,5%.

Tabel 3. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Periode Menjabat sebagai Pegawai BUMD

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase (%)
1-10 tahun	18	45.00
11-20 tahun	19	47.50
>20 tahun	3	7.50
Total	40	100

Sumber: Data responden diolah, 2024

Berdasarkan tabel 3, dapat disimpulkan bahwa mayoritas jumlah responden pada penelitian ini memiliki tingkat pengalaman menjabat sebagai pegawai BUMD selama 11 – 20 Tahun.

Tabel 4. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase (%)
SMA	10	25.00
S1	27	67.50
S2	3	7.50
Total	40	100

Sumber: Data responden diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4, dapat disimpulkan bahwa mayoritas jumlah responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan terakhir S1.

Tabel 5. Hasil *Outer Loading*

	PERSEPSI MANAJEMEN_	PRAKTIK PENGAWASAN
X2	0.837	
X3	0.833	
X4	0.702	
X5	0.891	
X6	0.922	
X7	0.726	
X8	0.917	
X9	0.746	
Y1		0.883
Y2		0.847
Y3		0.721
Y4		0.855

Sumber: SMARTPLS 4, 2024

Berdasarkan tabel 5 diatas, dapat dilihat bahwa nilai *outer loading* pada masing masing konstruk yang diuji sudah lebih besar dari 0.7 sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap indikator dapat dikatakan valid.

Tabel 6. Hasil *Composite Reliability*

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
PERSEPSI MANAJEMEN_	0.932	0.940	0.944	0.682
PRAKTIK PENGAWASAN	0.850	0.877	0.897	0.687

Sumber: SMARTPLS 4, 2024

Berdasarkan tabel 6 diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai AVE sudah lebih besar dari 0.5 serta nilai *composite reliability* lebih besar dari 0.7 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Tabel 7. Hasil *R Square*

	R Square	R Square Adjusted
PRAKTIK PENGAWASAN	0.739	0.732

Sumber: SMARTPLS 4, 2024

Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat bahwa nilai R Square sebesar 0.739, hal ini menjelaskan bahwa persepsi manajemen mampu mempengaruhi praktik pengawasan sebesar 73,9% sedangkan sisanya 26,1% merupakan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
PERSEPSI MANAJEMEN_ -> PRAKTIK PENGAWASAN	0.860	0.862	0.053	16,081	0.000

Sumber: SMARTPLS 4, 2024

Berdasarkan tabel 8, dapat dijelaskan bahwa persepsi manajemen pada nilai *P Value* sebesar 0.000. Nilai tersebut tentunya lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi manajemen berpengaruh terhadap praktik manajemen dan hipotesis diterima. Hasil ini menjelaskan dari berbagai pandangan penelitian terdahulu bahwa untuk menilai tata kelola perusahaan pemerintahan sangat tergantung pada struktur organisasi, dalam hal ini adalah para manajemen dan dewan komisaris Bebhuck & Hamdani (2008), hal itu diperkuat dengan hasil penelitian Hermalin dan Weisbach (2001) Dewan komisaris merupakan bagian integral dari tata kelola organisasi besar. Penelitian Maulana et al (2022) menyimpulkan bahwa persepsi manajemen mampu memberikan pengaruh terhadap kinerja perusahaan, sehingga pengawasan yang dilakukan dewan pengawas atau komisaris menjadi lebih mudah dikarenakan kemampuan manajemen meningkat dalam mengelola perusahaan.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibuatkan kesimpulan bahwa persepsi manajemen berpengaruh terhadap praktik pengawasan yang dilakukan dewan pengawas komisaris BUMD Kabupaten Garut. Semakin baik pengaruh persepsi manajemen terhadap praktik pengawasan maka peran dan tanggungjawab dewan komisaris dapat dikatakan beroperasi secara optimal dan sesuai dengan yang seharusnya. Dimana dewan komisaris dapat membantu perusahaan untuk mengelola, menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan saran strategis kepada direksi dengan baik.

KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan pada penelitian ini adalah masih sedikit penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat membuat referensi penelitian terdahulu lebih banyak lagi.

Saran pada penelitian ini adalah diharapkan BUMD Kabupaten Garut terutama para manajemen dapat memperhatikan kinerja perusahaan dalam hal ini mengurangi praktik pengawasan dari dewan komisaris.

REFERENSI

- Bebchuk, L. A., & Hamdani, A. (2008). *The elusive quest for global governance standards*. *U. pa. L. rev.*, 157, 1263.
- Ghozali, Iman, and Hengky Latan. 2020. *Partial Least Square Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0. Edisi 2*. Semarang: Badan penerbit- Undip.
- Hermalin, B., & Weisbach, M. S. (2001). *Boards of directors as an endogenously determined institution: A survey of the economic literature*.
- Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. "*Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure*", *Journal of Finance Economic* 3:305- 360
- Maulana, I., Haryadi, B., & Arief, M. (2022). *The Corporate Governance Mechanism on Earnings Management and Firm Performance*. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 14(1), 1-16.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah
- Undang-undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah